

AGRIEKONOMIKA
JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
ISSN 2301-9948
e ISSN 2407-6260

VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2012

AGRIEKONOMIKA, terbit dua kali dalam setahun yaitu pada April dan Oktober yang memuat naskah hasil pemikiran dan hasil penelitian bidang sosial, ekonomi dan kebijakan pertanian dalam arti umum.

Pemimpian Redaksi

Ihsannudin

Redaksi Pelaksana

Elys Fauziah
Andri K. Sunyigono
Slamet Widodo

Tata Letak dan Perwajahan

Taufik R.D.A Nugroho
Mokh Rum

Pelaksana Tata Usaha

Taufani Sagita
Reni Purnamasari

Mitra Bestari

Subejo, SP, M.Sc, Ph.D (UGM)
Dr. Prasetyono (UTM)
Prof. Dr. Ir. Muhammad Zainuri, M.Sc

Alamat Redaksi

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian
Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang 02 Kamal Bangkalan
Telp. (031) 3013234 Fax. (031) 3011506
Surat elektronik: agriekonomika@gmail.com
Laman: <http://agribisnis.trunojoyo.ac.id/agriekonomika>

AGRIEKONOMIKA diterbitkan sejak April 2012 oleh Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura.

Redaksi mengundang segenap penulis untuk mengirim naskah yang belum pernah diterbitkan oleh media maupun lembaga lain. Pedoman penulisan dapat dilihat pada bagian belakang jurnal. Naskah yang masuk dievaluasi oleh mitra bestari dan redaksi pelaksana dengan metode *blind review*.

AGRIEKONOMIKA
JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
ISSN 2301-9948
e ISSN 2407-6260

VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2012

DAFTAR ISI

POTENSI DAN TINGKAT PEMANFAATAN SUMBERDAYA IKANDEMERSAL DI PERAIRAN KABUPATEN PEKALONGAN.....	1
Novita Lusi Andriani dan Dian Ayunita NND	
KERAGAAN AGROINDUSTRI KERUPUK UDANG DI KECAMATANKWANYAR KABUPATEN BANGKALAN	15
Ika Hastinawati dan Mokh. Rum	
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KOPERASI NELAYAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTANYA.....	25
Slamet Subari	
OPTIMALISASI KEPEMIMPINAN NASIONAL DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DISTRIBUSI PANGAN DAPAT MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL	36
Arditya Wicaksono	
UPAYA PEMBIBITAN BIJI SARANG SEMUT (Myrmecodiapendans) DENGAN KULTUR JARINGAN	47
Heru Sudrajad	
PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP BUAH APEL IMPOR DI TOKO BUAH HOKKY DAN PASAR TRADISIONAL AMPEL SURABAYA	52
Jeani Noviana Rahayu, Elys Fauziyah, dan Aminah HM Ariyani	
PERSEPSI DAN SIKAP WANITA TANI TERHADAP AGROINDUSTRI PANGAN DI KABUPATEN BANTUL.....	68
Supriyati	
PEMODELAN PERUBAHAN IKLIM DAERAH KABUPATEN TUBAN MENGGUNAKAN MAGICC/SCENGEN.....	77
Marita Ika Joesidawati	

OPTIMALISASI KEPEMIMPINAN NASIONAL DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DISTRIBUSI PANGAN DAPAT MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Arditya Wicaksono

Staff Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional
arditwicaksono@gmail.com

ABSTRACT

Conversion of agricultural land should be prevented from governments and national leaders. Regulations prohibiting the conversion of agricultural land should be consistent with the commitment reinforced with evidence. Rehabilitation Program and the Agricultural Land Utilization Optimization can be implemented through a variety of strategic programs along with the optimization of the technology evolve over time. Coordination among relevant institutions is absolutely necessary for the achievement of synergy, synchronicity in national food security

Keywords: national leaders, regulatory and policy synergy

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup dan karenanya kecukupan pangan bagi setiap orang setiap waktu merupakan hak azasi yang layak dipenuhi. Berdasarkan kenyataan tersebut masalah pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk setiap saat di suatu wilayah menjadi sasaran utama kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Oleh karena itu kebijakan (pemantapan) ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan serta merupakan fokus utama dalam pembangunan pertanian. Peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kesempatan kerja bagi penduduk guna memperoleh pendapatan yang layak agar akses terhadap pangan merupakan dua komponen utama dalam perwujudan ketahanan pangan. Kebijakan pemantapan ketahanan pangan dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah terwujudnya stabilitas pangan nasional

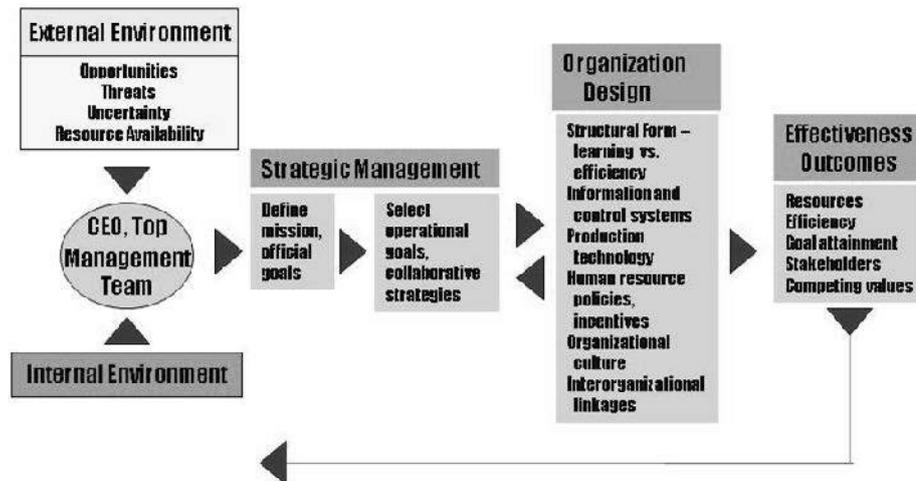
Undang-Undang No 7 Tahun 1996, diartikan pangan dalam arti luas mencakup makanan dan minuman hasil-hasil tanaman dan ternak serta ikan baik produk primer maupun olahan. Dengan definisi pangan seperti itu tingkat ketersediaan pangan nasional untuk konsumsi diukur dalam satuan energi dan protein pada tahun 2003 sebesar 3076 Kkal/kapita/hari dan 76.54 gr protein/kapita/hari. Angka tersebut telah melebihi standar kecukupan energi dan protein yang direkomendasikan dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII Tahun 2000 masing-masing sebesar 2500 Kkal/kapita/hari dan 55 gr protein/kapita/hari.

Pangan merupakan isu sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh sebab itu ketahanan pangan menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Permasalahan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan permintaan

pangan yang lebih cepat dari pertumbuhan penyediaannya. Permintaan yang meningkat cepat tersebut merupakan resultante dari peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat dan perubahan selera. Sementara itu kapasitas produksi pangan nasional pertumbuhannya lambat bahkan stagnan disebabkan oleh adanya kompetisi dalam pemanfaatan sumberdaya tanah dan air serta stagnannya pertumbuhan produktivitas tanah dan tenaga kerja pertanian. Ketidakseimbangan pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan kapasitas produksi nasional tersebut mengakibatkan adanya kecenderungan meningkatnya penyediaan pangan nasional yang berasal dari impor. Ketergantungan terhadap pangan impor ini terkait dengan upaya mewujudkan stabilitas penyediaan pangan nasional, harapannya setiap pemimpin negara ini hendaknya mampu memberikan kontribusi nyata, konkrit dan inovatif dalam pencapaian ketahanan pangan yang signifikan. Tulisan ini berupaya mensinergikan dampak kepemimpinan nasional yang dapat menstimulus ketahanan pangan, bagaimana konseptualnya, bagaimana analisis swot nya dan bagaimana pola kepemimpinan yang tepat.

Kepemimpinan dan Manajerial

Griffin dan Ebert, Menilai kepemimpinan (*leadership*) adalah proses memotivasi orang lain untuk mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan Lindsay dan Patrick berpendapat mengenai "Mutu Total dan Pembangunan Organisasi" mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah suatu upaya merealisasikan tujuan perusahaan dengan memadukan kebutuhan para individu untuk terus tumbuh berkembang dengan tujuan organisasi. Perlu diketahui bahwa para individu merupakan anggota dari perusahaan. Peterson *et.al* mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu kreasi yang berkaitan dengan pemahaman dan penyelesaian atas permasalahan internal dan eksternal organisasi. Dari ketiga definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu upaya dari seorang pemimpin untuk dapat merealisasikan tujuan organisasi melalui orang lain dengan cara memberikan motivasi agar orang lain tersebut mau melaksanakannya, dan untuk itu diperlukan adanya keseimbangan antara kebutuhan individu para pelaksana dengan tujuan perusahaan. Lingkup kepemimpinan tidak hanya terbatas pada permasalahan internal organisasi, melainkan juga mencakup permasalahan eksternal. Dalam konteks penugasan secara proporsional dan profesional seorang pemimpin harus dapat menggerakkan kelembagaannya sedemikian rupa sehingga tujuan dapat dicapai. Kepemimpinan lebih erat kaitannya dengan fungsi penggerakan (*actuating*) dalam manajemen. Fungsi penggerakan mencakup kegiatan memotivasi, kepemimpinan, komunikasi, pelatihan, dan bentuk-bentuk pengaruh pribadilainnya. Fungsi tersebut juga dianggap sebagai tindakan mengambil inisiatif dan mengarahkan pekerjaan yang perlu dilaksanakan dalam sebuah organisasi. Dengan demikian *actuating* sangat erat kaitannya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Secara sederhana dalam seorang pemimpin hendaknya mampu melakukan langkah-langkah sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1.

Top Management Role in Organization Direction, Design, and Effectiveness

Seorang pemimpin setidaknya dia mampu melaksanakan political mapping untuk internal dan eksternal organisasi kemudian dilakukan analisis dengan parameter visi, misi, rencana strategis dan desain kebijakan makro sehingga di tahap awal mampu terlihat secara seksama apa saja yang selama ini menjadi kendala, dan peluangnya ada dimana. Tahap selanjutnya adalah perencanaan aksi yang lebih detail dan konkrit serta dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten dan berdedikasi sehingga apa yang direncanakan dapat dilaksanakan. Proses ini akan sejalan dengan dinamika masyarakat dan internal organisasi itu sendiri.

Kebijakan (pemantapan) ketahanan pangan nasional yang dirumuskan adalah terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pangan tahun 1996 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No 68 tahun 2001. Kebijakan yang dirumuskan diselaraskan dengan isu global yang disepakati dalam Pertemuan Puncak Pangan Dunia tahun 2002 (*WorldFood Summit- five years later : WFS - fyl*) yaitu mencapai ketahanan pangan bagi setiap orang dan mengikis kelaparan di seluruh dunia. Untuk melaksanakan tugas tersebut, diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 132 Tahun 2001 tanggal 31 Desember tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Tugas DKP sesuai Keppres adalah:

- a. Merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan nasional yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta mutu, gizi, dan keamanan pangan; dan
- b. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan nasional.

Langkah penting yang telah dilakukan dalam rangka merumuskan kebijakan ketahanan pangan nasional adalah:

- 1. Arah pembangunan perlu direformasi, dengan memfokuskan pembangunan pada sektor pertanian dan pedesaan,

2. Indonesia harus mempunyai target/sasaran (dalam menurunkan kemiskinan). Strategi yang ditempuh dan tindakan bersama dalam upaya penurunan jumlah penduduk miskin;
3. Kemiskinan identik dengan pemilikan tanah sempit, sehingga diperlukan Peraturan Pemerintah yang mengatur penataan struktur penguasaan dan pemilikan tanah serta pembangunan irigasi, dan
4. Hasil kesepakatan tersebut perlu dievaluasi dan dibahas secara berkelanjutan, dan ada koordinasi lintas sektor yang terkait dengan pangan

Kebijakan Strategis Sektor Pangan

Pangan adalah Problem sosial sekaligus fakta, bisa diukur dan ditangani secara ilmiah dimana dengan menganalisa sebab berarti memecahkan masalah. Pandangan fungsionalis memandang persoalan pangan pada dasarnya adalah disfungsi tanah pertanian. Problem dalam pengertian ini dapat dianalisis dari segi asal-usulnya dalam kondisi sosial tertentu, setelah mengidentifikasi kondisi-kondisi yang menimbulkan disfungsi para pembuat kebijakan dapat menangani problem yang tampak maupun yang laten.

Menciptakan suatu keadaan masyarakat yang sejahtera salah satu cara yang harus diambil oleh pemerintah adalah dengan membuat suatu kebijakan publik. Setiap kebijakan negara harus selalu berorientasi pada kepentingan publik (*public interes*). Ilmu kebijakan menggunakan dua pendekatan utama yang menurut Lasswell dapat didefinisikan dalam terminologi pengetahuan sebagai proses politik dan pengetahuan proses politik **pertama**; analisis kebijakan berkaitan dengan pengetahuan dalam, dan untuk proses politik, **kedua**; analisis proses kebijakan berkaitan dengan pengetahuan tentang formasi dan implementasi kebijakan publik. Kedua faktor tersebut harus beriringan dan menjadi sebuah prioritas utama

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu program yang diproyeksikan dari tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik. Harold Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai *•a projected program of goal, value and practices*, (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek... praktek yang terarah). Sedang menurut Carl J. Frederick kebijakan adalah:

‡. a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose..^

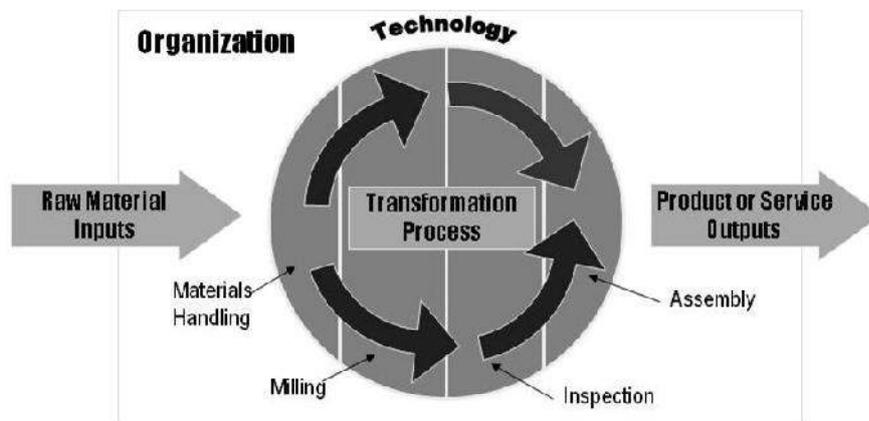
Pengertian kebijaksanaan lain diuraikan oleh Amara Raksasataya intinya kebijaksanaan terdiri dari tiga elemen yaitu: identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. David Easton mengartikan kebijakan negara sebagai ‡pengalokasian nilai-nilai secara paksa atau sah kepada seluruh anggota masyarakat^, sedangkan dari glossary di bidang administrasi negara arti kebijakan negara meliputi:

1. Susunan rancangan tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dihadapi masyarakat,
2. Adapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan,

3. Masalah yang kompleks yang dinyatakan dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Kaitan makna teori kebijakan tersebut dengan ketahanan pangan dari proyeksi prioritas pemerintah yang dituang dalam sebuah kebijakan yang implementatif dan komprehensif. Beberapa kebijakan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan upaya mewujudkan stabilitas (ketersediaan) pangan nasional adalah (1) kebijakan dan strategi diversifikasi pangan di Indonesia serta program aksi diversifikasi pangan, (2) di bidang perberasan: kebijakan harga dasar pembelian pemerintah (HDPP) dan tarif impor, (3) kemandirian pangan, dan (4) kebijakan (pangan) transgenik. Kebijakan dan strategi serta rencana program aksi diversifikasi pangan dilaksanakan dengan tujuan (1) menyadarkan masyarakat agar dengan sukarela dan atas dasar kemampuannya sendiri melaksanakan diversifikasi pangan dan meningkatkan pengetahuannya, dan (2) mengurangi ketergantungan terhadap beras dan pangan impor dengan meningkatkan konsumsi pangan, baik nabati maupun hewani dengan meningkatkan produksi pangan lokal dan produk otanahnya. Beberapa upaya percepatan diversifikasi pangan dalam jangka pendek adalah (a) internalisasi, sosialisasi, promosi dan publikasi rencana aksi diversifikasi pangan; (b) peningkatan ketersediaan pangan berbasis pada potensi sumberdaya wilayah yang berwawasan lingkungan; (c) peningkatan kemampuan dan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengembangan diversifikasi produktivitas; (d) pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan diversifikasi pangan; (e) peningkatan akses pangan dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga; (f) pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi; dan (g) pemantauan kegiatan diversifikasi pangan dalam pemantapan ketahanan pangan.

Kedepan harapannya pemimpin yang inovatif yang mampu memetakan dari hulu sampai hilir produksi pangan hendaknya mampu membuat Strategi umum pembangunan pertanian adalah memajukan agribisnis, yaitu membangun secara sinergis dan harmonis aspek-aspek: (1) industri hulu pertanian yang meliputi perbenihan, input produksi lainnya dan alat mesin pertanian; (2) pertanian primer (*on-farm*); (3) industri hilir pertanian (pengotahan hasil); dan (4) jasa-jasa penunjang yang terkait. Mengingat bahwa pelaku utama agribisnis adalah petani dan pengusaha, dan tanpa adanya insentif pendapatan mereka akan enggan menekuni agribisnis, maka kata kunci dalam meningkatkan kinerja sektor ini adalah menciptakan insentif ekonomi yang menunjang daya tarik agribisnis dan penggunaan teknologi yang pas. Sebab Permasalahan utama yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia saat ini adalah bahwa pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dari pertumbuhan penyediaan. Permintaan yang meningkat merupakan resultante dari peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, dan perubahan selera. Sementara itu, pertumbuhan kapasitas produksi pangan nasional cukup lambat dan stagnan, karena: (a) adanya kompetisi dalam pemanfaatan sumberdaya tanah dan air, serta (b) stagnansi pertumbuhan produktivitas tanah dan tenaga kerja pertanian. Ketidak seimbangan pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan kapasitas produksi nasional mengakibatkan kecenderungan pangan nasional dari impor meningkat, dan kondisi ini diterjemahkan sebagai ketidak mandirian penyediaan pangan nasional. Dengan kata lain hal ini dapat diartikan pula penyediaan pangan nasional (dari produksi domestik) yang tidak stabil.



Gambar 2.
Transformation Process Production with Technology

Pengembangan teknologi guna meningkatkan efisiensi akan mencakup spektrum teknologi yang sangat luas dari teknologi yang terkait dengan teknologi pengembangan sarana produksi (benih, pupuk dan insektisida), teknologi pengotakan tanah (traktor), teknologi pengelolaan air (irigasi gravitasi, irigasi pompa, efisiensi dan konservasi air), teknologi budidaya (cara tanam, jarak tanam, pemupukan berimbang, pola tanam, pergiliran varietas), teknologi pengendalian hama terpadu (PHT). Teknologi pertanian berperan penting dalam mendukung pengembangan pertanian pangan di areal pengembangan baru (ekstensifikasi). Pengembangan tanah pertanian baru, menurut kondisi agro ekosistemnya dapat dibedakan menjadi: (1) tanah sawah cetakan baru, (2) tanah kering (ladang atau di bawah naungan), dan (3) tanah rawa (pasangsurut dan lebak). Sudah barang tentu teknologi yang dibutuhkan untuk pengembangan di areal ekstensifikasi ini akan bersifat lokal spesifik. Pucuk pimpinan dari level pusat, provinsi maupun Kab/kota dapat berperan aktif dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di wilayah kerjanya. Partisipasi tersebut diharapkan memperhatikan beberapa azas, yaitu:

1. Mengembangkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah sesuai dengan potensi sumberdaya spesifik yang dimilikinya, serta disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat.
2. Menerapkan kebijakan yang terbuka dalam arti menselaraskan kebijakan ketahanan pangan daerah dengan kebijakan ketahanan pangan nasional.
3. Mendorong terjadinya perdagangan antar daerah.
4. Mendorong terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan.

Dengan memperhatikan beberapa azas kebijakan ketahanan pangan di Indonesia, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut diantaranya meliputi:

1. Pemerintah daerah perlu menyadari akan pentingnya memperhatikan masalah ketahanan pangan di wilayahnya.

2. Perlunya apresiasi tentang biaya, manfaat, dan dampak terhadap pembangunan wilayah dan nasional program peningkatan ketahanan pangan di daerah kepada para penentu kebijakan di daerah
3. Pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan dan strategi untuk menangani masalah ketahanan pangan di daerah.
4. Perlu dikembangkan suatu wahana untuk saling tukar menukar informasi dan pengalaman dalam menangani masalah ketahanan pangan antar pemerintah daerah.

Diversifikasi Produksi Pangan

Diversifikasi produksi pangan merupakan aspek yang sangat penting dalam ketahanan pangan. Diversifikasi produksi pangan bermanfaat bagi upaya peningkatan pendapatan petani dan memperkecil resiko berusaha. Diversifikasi produksi secara langsung ataupun tidak juga akan mendukung upaya penganeekaragaman pangan (diversifikasi konsumsi pangan) yang merupakan salah satu aspek penting dalam ketahanan pangan. Ada dua bentuk diversifikasi produksi yang dapat dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan, yaitu:

1. Diversifikasi horizontal; yaitu mengembangkan usahatani komoditas unggulan sebagai *core of business* serta mengembangkan usahatani komoditas lainnya sebagai usaha pelengkap untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam, modal, dan tenaga kerja keluarga serta memperkecil terjadinya resiko kegagalan usaha.
2. Diversifikasi regional; yaitu mengembangkan komoditas pertanian unggulan spesifik lokasi dalam kawasan yang luas menurut kesesuaian kondisi agro ekosistemnya, dengan demikian akan mendorong pengembangan sentra-sentra produksi pertanian di berbagai wilayah serta mendorong pengembangan perdagangan antar wilayah.

Ketahanan Pangan dan Tantangan Globalisasi dimana Thompson & Cowan mencatat perubahan kebijakan dan pendefinisian formal ketahanan pangan dalam kaitannya dengan globalisasi perdangan yang terjadi di beberapa Negara. Contohnya, Malaysia mendefinisikan ulang ketahanan pangannya sebagai swasembada 60% pangan nasional. Sisanya, 40% didapatkan dari import pangan. Malaysia kini memiliki tingkat ketahanan pangan yang kokoh. Ini memberikan ilustrasi yang jelas bahwa ketahanan pangan dan swasembada adalah dua hal yang berbeda. Tantangan terbesar Indonesia adalah bahwa tidak dengan mudah kita mengabaikan perdagangan pangan global karena tingkat urbanisasi yang tinggi yang berbarengan dengan tingkat kemiskinan perkotaan, yang mana sangat membutuhkan pangan yang murah, kecuali ketergantungan pada produksi pangan domestik bisa menjamin harga pangan yang murah bagi kaum miskin kota. Tapi pada saat yang sama harus menghadapi cara bagaimana memproteksi petani kecil dan miskin dari dampak perdagangan pangan global. Meningkatnya populasi penduduk perkotaan dari 15% di tahun 1950 menjadi 46% di tahun 2003, menjadi tantangan pemenuhan ketahanan pangan kota Dilema bagi Indonesia adalah bahwa Petani tidak banyak menikmati harga dasar pangan yang adil. Sayangnya harga yang adil bagi petani identik dengan naiknya harga pangan. Sedangkan kaum miskin kota, yang semakin meningkat dari tahun ke tahun justru membutuhkan pangan yang murah, demi akses yang lebih baik bagi kaum miskin.

Kebijakan Tanah Pertanian Abadi

Tanah pertanian abadi merupakan salah satu opsi kebijakan yang oleh sebagian pihak dianggap paling tepat untuk mencegah proses alih fungsi tanah pertanian. Pada dasarnya tanah pertanian abadi adalah penetapan suatu kawasan sebagai daerah konservasi, atau perlindungan, khusus untuk usaha pertanian. Alih fungsi tanah pertanian ke penggunaan nonpertanian dilarang dengan suatu ketetapan peraturan perundang-undangan. Jika dapat dilaksanakan secara efektif maka pastilah konversi tanah di kawasan konservasi tersebut tidak akan terjadi. Secara teoritis, dengan asumsi dapat diefektifkan, opsi kebijakan inilah yang paling ampuh untuk mencegah konversi tanah pertanian. Akar penyebab konversi tanah pertanian ialah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi maupun penduduk, yang di Indonesia keduanya masih akan terus sangat besar sehingga konversi tanah pertanian mustahil dapat dihentikan sepenuhnya, lebih-lebih di kawasan pusat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, upaya mencegah konversi tanah pertanian seperti upaya membendung sebuah lautan sebab era global berdampak pada industrialisasi dimana efeknya paling terasa adalah berkurangnya tanah pertanian dan ekosistem alam.

Proses konversi tanah pertanian pada umumnya berlangsung melalui dua tahapan yaitu: (1) pelepasan hak kepemilikan tanah petani kepada nonpetani yang kemudian diikuti dengan (2) pemanfaatan tanah pertanian tersebut untuk kegiatan di luar pertanian. Dampak konversi tanah yang berupa penurunan kapasitas produksi pertanian, penurunan daya serap tenaga kerja pertanian, hilangnya investasi pertanian dan meningkatnya masalah sosial dan lingkungan pada dasarnya baru terjadi pada tahap kedua. Namun tahap kedua tersebut tidak akan terjadi tanpa melalui tahap pertama karena sebagian besar tanah pertanian dimiliki oleh petani. Oleh karena itu penanganan masalah konversi tanah pertanian sebenarnya dapat ditempuh melalui tiga pendekatan yaitu: (1) mengendalikan pelepasan hak kepemilikan tanah petani kepada nonpetani, (2) mencegah alih fungsi tanah, dan (3) menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh konversi tanah. Masing-masing pendekatan tersebut memerlukan instrumen kebijakan yang berbeda. Jika penjualan tanah petani merupakan suatu proses rasional yang mengacu pada prinsip ekonomi maka pemberian insentif ekonomi kepada petani merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mencegah penjualan tanah petani. Namun cara ini membutuhkan dukungan dana yang sangat besar akibat *rente ekonomi* tanah pertanian yang sangat rendah dibandingkan pemanfaatan tanah untuk sektor ekonomi lainnya. Selain itu, asumsi bahwa transaksi tanah petani kepada investor disebabkan oleh dorongan ekonomi petani tidak selamanya benar karena pada kasus konversi tanah secara masal peranan birokrasi justru seringkali lebih dominan, sehingga petani terkondisikan untuk menjual tanahnya. Yang lebih penting menurut penulis adalah bagaimana pucuk pimpinan (kepemimpinan) nasional mampu dan memiliki visi yang jelas misi yang konkrit untuk pengembangan kebijakan pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan, jika tidak ada komitmen saya merasa ragu kebijakan pangan nasional sebagus apapun akan berhasil, sebab bisnis tanah pertanian yang di ubah menjadi non pertanian memberikan stimulus (uang) yang cepat dan menggiurkan bagi masyarakat

Bagi petani sendiri penjualan tanah yang mereka miliki sebenarnya tidak menguntungkan secara sosial, karena di daerah pedesaan kepemilikan tanah merupakan salah satu simbol sosial. Sementara penelitian Jamal mengungkapkan

bahwa sebagian besar petani yang menjual tanahnya untuk dikonversi sebenarnya tidak menghendaki penjualan tanah tersebut. Penyebab utamanya adalah penjualan tanah tersebut tidak selalu menguntungkan dalam jangka panjang karena untuk beralih kepada kegiatan ekonomi yang baru dibutuhkan waktu penyesuaian, sementara fleksibilitas petani untuk menggeluti bidang usaha yang baru secara umum terbatas, dapat dikatakan bahwa pemberian insentif ekonomi kepada petani belum tentu efektif untuk mencegah penjualan tanah petani karena proses transaksi tanah tersebut tidak merupakan fenomena ekonomi secara murni atau terjadi melalui mekanisme pasar. Pendekatan kedua dapat dilakukan dengan menghambat dan mencegah alih fungsi tanah pertanian ke nonpertanian. Gagasan penetapan tanah pertanian abadi termasuk dalam kategori ini. Kebijakan seperti ini jelas termasuk kategori melawan pasar tanah. Pertanyaannya, apakah kekuatan pasar yang sangat besar dapat dilawan?

Pada pendekatan ketiga, dampak negatif konversi tanah diatasi dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan lain yang mampu mengkompensasikan peluang-peluang yang hilang akibat konversi tanah. Pencetakan sawah baru dan pembangunan jaringan irigasi adalah contoh dari penerapan pendekatan tersebut. Dengan kedua cara tersebut maka dampak konversi tanah terhadap masalah pangan nasional memang dapat ditanggulangi. Namun cara ini pada akhirnya tetap akan dibatasi oleh sumber daya tanah yang tersedia dan membutuhkan dukungan dana yang besar. Selain itu, pendekatan ini tidak mampu mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang terjadi di lokasi atau di daerah yang mengalami konversi tanah karena pencetakan sawah atau pembangunan jaringan irigasi yang ditempuh biasanya bukan dilakukan di daerah yang mengalami konversi tanah, tetapi di daerah lain yang sumber daya tanahnya masih tersedia. Fenomena demikian terjadi karena konversi tanah pertanian umumnya terjadi di daerah dengan kelangkaan tanah tinggi sehingga peluang pembukaan sawah baru atau pembangunan jaringan irigasi sangat terbatas. Pada masa pemerintahan otonomi dimana egoisme daerah semakin kental, pendekatan demikian mungkin akan semakin sulit diterapkan jika dana pembangunan yang dibutuhkan diserahkan kepada masing-masing daerah.

KESIMPULAN

Mencegah konversi tanah pertanian hendaknya pemerintah yang terdiri dengan para pemimpin nasional hendaknya membuat aturan tentang pelarangan alih fungsi tanah pertanian dalam bentuk apapun sebab negara ini telah memiliki undang-undang tata ruang dimana outputnya adalah rencana tata ruang, tata tanah dan tata detail penggunaan ruang, selain itu sudah banyak instansi pemerintah hendaknya lebih intensif dalam koordinasi antara sektor terkait sehingga upaya-upaya strategis nasional di bidang pangan dapat terlaksana dengan mencapai hasil yang optimal.

Program Rehabilitasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Pertanian dapat dilaksanakan melalui: (a) upaya rehabilitasi dan pembangunan sistem irigasi; (b) upaya optimalisasi pemanfaatan tanah tidur dan tanah terlantar, dan (c) upaya pencetakan sawah baru. Selain melalui upaya pembangunan fisik, program ini hanya dapat berhasil bila ditunjang dengan kebijakan insentif usaha tani, fasilitasi pembiayaan dan penataan kelembagaan kepemilikan tanah. Program ini dapat dikategorikan program jangka pendek.

Instansi terkait hendaknya mempersiapkan rancangan upaya optimalisasi pemanfaatan tanah tidur dan tanah terlantar. Upaya rehabilitasi dan

pembangunan sistem irigasi serta upaya pencetakan tanah sawah baru dapat terus dilaksanakan oleh instansi terkait. Fasilitasi kebijakan insentif dan pembiayaan perlu didukung oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dalam koordinasi Menko Ekonomi, sementara penataan kelembagaan kepemilikan tanah merupakan porsi utama BPN.

Program perluasan areal pertanian merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian dan sekaligus meningkatkan rata-rata luas pemilikan tanah pertanian. Pada masa lalu, peran pemerintah dalam program ini terutama disalurkan melalui program transmigrasi. Sejak tahun 1997, program transmigrasi mengalami hambatan, yang jelas berdampak pada perlambatan perluasan areal tanah pertanian. Revitalisasi program perluasan areal pertanian merupakan program jangka menengah-panjang yang perlu dirancang saat ini juga.

Pengendalian konversi tanah pertanian melalui pendekatan *sosio-ekonomi-juridis* dimaksudkan untuk memperlambat dan mengarahkan proses alih fungsi tanah pertanian, sehingga dampak negatifnya dapat ditekan atau diakomodir, melalui penetapan peraturan dan perundang-undangan yang disusun berdasarkan prinsip sosial-ekonomi sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Termasuk dalam kategori ini ialah: (a) penataan struktur pajak dan iuran pembangunan berbasis tanah, (b) penyusunan rencana dan pengawasan implementasi tata ruang wilayah; dan (c) penataan sistem kepemilikan tanah. Secara terinci kebijakan pengendalian konversi tanah pertanian ke penggunaan nonpertanian

Konversi tanah pertanian, khususnya tanah sawah di Jawa, memang cukup besar sehingga merupakan salah satu penyebab utama kecenderungan berlanjutnya marjinalisasi usaha tani dan menurunnya laju pertumbuhan produksi tanaman pangan di Indonesia. Dampak konversi tanah pertanian bersifat permanen karena konversi tanah pertanian juga permanen. Sekali beralih fungsi ke nonpertanian, praktis tidak akan berubah lagi ke fungsi pertanian. Proses konversi tanah pertanian merupakan fenomena alamiah, tidak mungkin dicegah selama ekonomi dan atau penduduk masih terus tumbuh dan berkembang. Kebijakan yang bersifat melarang konversi tanah termasuk penetapan tanah pertanian abadi, sangat sukar diefektifkan.

Strategi kebijakan yang dianjurkan ialah akomodasi kompensatif dan pengendalian sosio-ekonomi juridis. Konversi tanah pertanian dipandang sebagai tantangan yang mustahil dihentikan, namun dapat dikendalikan dengan pengaturan tata ruang dan insentif serta pada saat yang sama dilakukan upaya-upaya kompensasi dengan optimalisasi pemanfaatan tanah yang ada dan membuka tanah baru.

DAFTAR PUSTAKA

Griffin W. Ricky and Ebert J. Ronald, 1999. *Business* New Jersey: Prentice Hall International Inc,

Islamy, M Irfan, 1994, *Kebijakan Negara*, Jakarta Bumi Aksar

-----, 1994. *Prinsip-prinsip perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara,

- , 1988, *Materi Pokok Kebijakan Publik*, Jakarta Modul Universitas Terbuka
- Thoha Miftah, 1990. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali.
- Lindsay M. William dan Patrick A. Joseph, 1997 *Total Quality and Organization Development* Florida: St. Lucie Press
- Parsons Wayne, 2006, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* Jakarta, Prenada Media
- Peterson W. Marvin, at. all, 1997 *Planning and Management for a Changing Environment*, San Francisco: Jossey-Bass Publishers
- Winardi, 2000 *Asas-asas Manajemen* Bandung. Penerbit Mandar Maju
- Lewin Arie Y. and Carroll U. Stephens, "CEO Attributes as Determinants of Organization Design: An integrated Model," *Organization Studies* 15, no. 2 1994
- Thompson J. S. and Cowan J. T. (2000) *Globalizing Agro-Food Systems in Asia: Introduction World Development*, Vol. 28, No. 3, pp. 400-407, 2000,
- Rusastra, I.W. dan G.S. Budhi. 1997. *Keragaan Konversi Tanah Pertanian dan Strategi Antisipatif dalam Penanggulangannya. Kebijakan Pembangunan Pertanian : Analisis Kebijaksanaan Antisipatif dan Responsif*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- ¹Witjaksono, R. 1996. *Alih Fungsi Tanah : Suatu Tinjauan Sosiologis*. hlm. 64-82 dalam Hermanto (eds.). *Prosiding Lokakarya Persaingan dalam Pemanfaatan Sumber daya Tanah dan Air*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian dan Ford Foundation.
- Jamal, E. 1999. *Analisis Ekonomi dan Kelembagaan Alih Fungsi Tanah Sawah ke Penggunaan Nonpertanian di Kabupaten Karawang, Jawa Barat*. Thesis Program Pasca Sarjana. IPB, Bogor.
- Makalah Simposium Nasional *Ketahanan dan Keamanan Pangan pada Era Otonomi dan Globalisasi*, Faperta, IPB, Bogor, 22 November 2005

PEDOMAN PENULISAN
AGRIEKONOMIKA
JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
ISSN 2301-9948
e ISSN 2407-6260

KETENTUAN UMUM:

1. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan format yang ditentukan.
2. Penulis mengirim naskah ke alamat email agriekonomika@gmail.com.
3. Artikel yang dikirim harus dilampiri: a) surat pernyataan yang menyatakan bahwa artikel tersebut belum pernah diterbitkan atau tidak sedang diterbitkan di jurnal lain, yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh penulis. b) biodata tentang jenjang pendidikan, alamat, nomor telepon, atau e-mail penulis dengan jelas.
4. Keputusan pemuatan ataupun penolakan akan diberitahukan secara tertulis melalui email.

FORMAT PENULISAN:

1. Artikel ditulis pada kertas A4, atas 4 cm bawah 3 cm samping kanan 4 cm samping kiri 3 cm, spasi tunggal, Arial ukuran 11 Kecuali Judul Arial Ukuran 12 dengan panjang halaman 10-15 halaman.
2. Sistematika penulisan:

▪ **SISTEMATIKA ARTIKEL HASIL PENELITIAN:**

Judul:

Ditulis ringkas dan lugas, maksimal 12 kata, hindari menggunakan kata *analisis*, *pengaruh*, *studi*.

Nama Penulis:

ditulis tanpa gelar

Nama institusi:

ditulis lengkap

Alamat surat elektronik:

ditulis lengkap

Abstract:

Ditulis dalam dalam satu paragraph dengan bahasa inggris 125-150 kata dengan kata kunci 4-5 kata. Abstrak tidak memuat uraian matematis dan mencakup esensi utuh penelitian, metode dan pentingnya temuan.

PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, sekilas tinjauan pustaka dan tujuan penelitian yang dimasukkan dalam paragraph-paragraph bukan dalam bentuk sub bab.

METODE PENELITIAN

Sub bab

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sub bab

SIMPULAN

Berupa poin-poin dengan penomoran sesuai tujuan

UCAPAN TERIMA KASIH

Jika diperlukan ditujukan pada peyandang dana dan pihak lain yang membantu terselesaikannya penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk yang sedapat mungkin diterbitkan 10 tahun terakhir dan diutamakan jurnal ilmiah (50-80 persen)

▪ SISTEMATIKA ARTIKEL HASIL PEMIKIRAN/ REVIEW:

Judul:

Ditulis ringkas dan lugas, maksimal 12 kata, hindari menggunakan kata $\hat{}$ analisis $\hat{}$, $\hat{}$ pengaruh $\hat{}$, $\hat{}$ studi $\hat{}$.

Nama Penulis:

ditulis tanpa gelar

Nama institusi:

ditulis lengkap

Alamat surat elektronik:

ditulis lengkap

Abstract:

Ditulis dalam dalam satu paragraph dengan bahasa inggris 125-150 kata dengan kata kunci 4-5 kata. Abstrak tidak memuat uraian matematis dan mencakup esensi utuh penelitian, metode dan pentingnya temuan.

PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, sekilas tinjauan pustaka dan tujuan penelitian yang dimasukkan dalam paragraph-paragraf bukan dalam bentuk sub bab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sub bab

SIMPULAN

Berupa poin-poin dengan penomoran sesuai tujuan

UCAPAN TERIMA KASIH

Jika diperlukan ditujukan pada peyandang dana dan pihak lain yang berkontribusi dalam penyelesaian penulisan artikel.

DAFTAR PUSTAKA

Hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk yang sedapat mungkin diterbitkan 10 tahun terakhir dan diutamakan jurnal ilmiah (50-80 persen)

3. Penulisan penomoran yang berupa kalimat pendek diintegrasikan dengan paragraf, contoh: Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengetahui tingkat risiko usaha garam, (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi risiko.
4. Tabel dan gambar dapat dimasukkan dalam naskah atau padalampiran sesudah naskah harus diberi nomor urut.
 - a. Tabel atau gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar.
 - b. Sumber acuan tabel atau gambar dicantumkan di bawah tabel atau gambar.
 - c. Garis tabel yang dimunculkan hanya pada bagian *header* dan garis bagian paling bawah tabel sedangkan untuk garis-garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan.
 - d. Tabel atau gambar bisa diedit dan dalam warna hitam putih yang representatif.

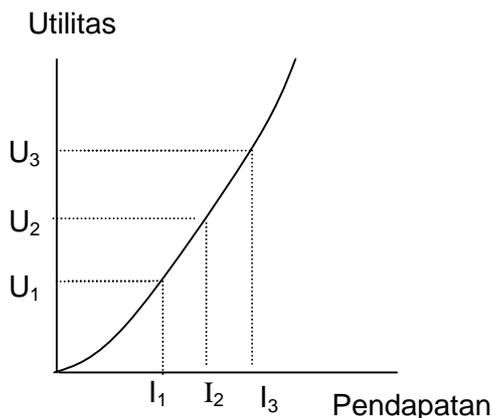
Contoh penyajian tabel:

Tabel 2
Deskripsi Penguasaan Lahan Pegaraman

Kategori Luas Lahan (Ha)	Jumlah	Persentase (%)
< 2	35	70
2,1 - 3	11	22
> 3,1	4	8
Jumlah	50	100
Rata-rata Luas lahan petani garam		2,04 Ha
Standar deviasi		0,95 Ha

Sumber: Data Primer Diolah, 2011

Contoh penyajian gambar:



Sumber: Debertin, 1986

Gambar 1
Perilaku Menerima Risiko

5. Cara penulisan rumus, Persamaan-persamaan yang digunakan disusun pada baris terpisah dan diberi nomor secara berurutan dalam parentheses (*justify*) dan diletakkan pada margin kanan sejajar dengan baris tersebut.
Contoh:
$$wt = f (yt , kt , wt-1) \quad (1)$$
6. Keterangan Rumus ditulis dalam satu paragraf tanpa menggunakan simbol sama dengan (=), masing-masing keterangan notasi rumus dipisahkan dengan koma.
Contoh:
dimana **w** adalah upah nominal, **yt** adalah produktivitas pekerja, **kt** adalah intensitas modal, **wt-1** adalah tingkat upah periode sebelumnya.
7. Perujukan sumber acuan di dalam teks (*body text*) dengan menggunakan nama akhir dan tahun. Kemudian bila merujuk pada halaman tertentu, penyebutan halaman setelah penyebutan tahun dengan dipisah titik dua. Untuk karya terjemahan dilakukan dengan cara menyebutkan nama pengarang aslinya.
Contoh:

- Hair (2007) berpendapat bahwa€
- Ellys dan Widodo (2008) menunjukkan adanya €.
- Ihsannudin dkk (2007) berkesimpulan bahwa€.

8. Penulisan Daftar Pustaka:

a. Pustaka Primer (Jurnal)

Nama belakang, nama depan, inisial (kalau ada), tahun penerbitan, judul artikel, nama dan nomor jurnal (cetak miring), halaman jurnal, contoh:
Happy, S. dan Munawar. 2005. The Role of Farmer in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 2(1): 159-173.

b. Buku Teks

Nama belakang, nama depan, inisial (kalau ada), tahun penerbitan, judul buku (cetak miring), edisi buku, kota penerbit, dan nama penerbit. Contoh:
Wiley, J. 2006. *Corporate Finance*. Mc. GrowHill Los Angeles.

c. Prosiding

Nama belakang, nama depan, tahun penerbitan, judul artikel, nama prosiding (cetak miring), penerbit (cetak miring), halaman, contoh:
Rizal, Taufik. 2012. Pengaruh Bank Syariah Terhadap Produksi Jagung di Madura. *Prosiding Seminar Nasional Kedaulatan Pangan Bangkalan Surabaya*: 119-159.

d. Skripsi/Tesis/Disertasi

Nama belakang, nama depan, tahun, judul Skripsi/Thesis/Disertasi, sumber (cetak miring), nama penerbit, kota penerbit. Contoh:

Subari, Slamet. 2008. Analisis Alokasi lahan mangrove Kabupaten Sidoarjo. *Disertasi*. Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

e. Internet

Nama belakang, nama depan, tahun, judul, alamat e-mail (cetak miring), tanggal akses. Contoh:

Zuhriyah, Amanatuz. 2011. Produktivitas Susu Peternak Rakyat. <http://agribisnis.trunojoyo.ac.id>. Diakses tanggal 27 Januari 2012.

METODE REVIEW

Artikel yang dinyatakan lolos dari *screening* awal akan dikirim kepada Mitra Bestari (*blind review*) untuk ditelaah kelayakan terbit. Adapun hasil dari *blind review* adalah:

1. Artikel dapat dipublikasi tanpa revisi.
2. Artikel dapat dipublikasi dengan perbaikan format dan bahasa yang dilakukan oleh penyunting. Perbaikan cukup dilakukan pada proses penyuntingan.
3. Artikel dapat dipublikasi, tetapi penulis harus memperbaiki terlebih dahulu sesuai dengan saran penyunting.
4. Artikel tidak dapat dipublikasi.